

PELATIHAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG NOLOKLA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA

Aldrin Watson Gainau¹, Dorteia Renyaan^{2*}, Abner Herry Bajari³, Nona Riri Indarti Pramono⁴,
Marlin Rumbiak⁵ Ilham⁶

^{1,2,3}) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

⁴) Bagian Perlengkapan dan Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

⁵) Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cenderawasih

⁶) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih
e-mail: renyaandorteia14@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini pengabdian ini dilaksanakan di Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Adapun tema yang diusung adalah “Penataan Administrasi Kampung”. Metode yang digunakan melalui ceramah, diskusi dan fasilitasi, dengan tiga tahapan, yaitu; tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepala kampung dan perangkatnya kampung mengenai administrasi pemerintahan desa, serta menjadi acuan untuk kegiatan pengabdian lanjutan mengenai administrasi pemerintahan kampung. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan telah memahami dengan baik dan benar tentang administrasi pemerintahan kampung dan dapat mengisi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kendati demikian, yang perlu diperhatikan adalah seperti pembuatan surat keputusan untuk setiap kegiatan dilaksanakan sehingga nantinya dapat diisi pada buku administrasi umum, khususnya di bagian buku surat keputusan kepala desa, termasuk pendataan penduduk yang lengkap, agar pemberian pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Kata kunci: Penataan, Administrasi, Kampung Nolakla

Abstract

This activity was carried out in Nolakla Village, East Sentani District, Jayapura Regency. The theme carried out is "Structuring Village Administration". The method used was through lectures, discussions and facilitation, with three stages, namely; the initial stage, the core stage and the final stage. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of the village head and village officials regarding village government administration, and to become a reference for further service activities regarding village government administration. The results of this service activity show that the activity participants have understood well and correctly about village government administration and can fill in the general administration book, population administration book, financial administration book, development administration book in accordance with the guidelines contained in the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration. However, what needs to be considered is such as making a decision letter for each activity carried out so that later it can be filled in the general administration book, especially in the decision letter book section of the village head, including complete population data collection, so that service delivery to the community is getting better.

Keywords: Structuring, Administration, Nolakla Village

PENDAHULUAN

Desa merupakan lembaga pemerintahan yang berada paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada konteks Papua, desa disebutkan dengan istilah kampung (Ilham

et al., 2020). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut Achmad (2018) merupakan tonggak utama dimulainya otonomi desa yang nyata dan bertanggungjawab. Di era otonomi desa, maka tata kelola administrasi yang ada di desa diharapkan mampu untuk menghadirkan perubahan-perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa yang berbasis pada masyarakat pedesaan (Mais et al., 2015).

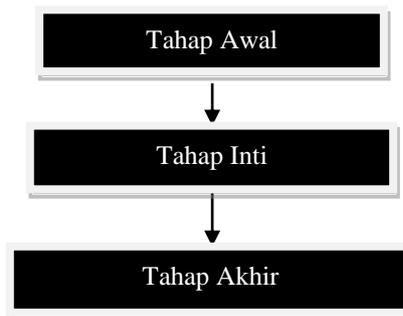
Dalam menjalankan pemerintahan desa, maka peran administrasi dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan suatu keniscayaan. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016 dijelaskan bahwa "Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa". Administrasi desa adalah keseluruhan proses pengelolaan begitu juga dengan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya kaitannya penyelenggaraan pemerintahan di desa (Lembong et al., 2017). Administrasi desa, menurut Tasik (2016) adalah proses pengelolaan, pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan desa.

Merujuk Laing et al., (2022) disebutkan bahwa untuk mengukur kemandirian desa salah satunya adalah melalui penataan administrasinya yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau arsip yang terdokumentasi dengan baik dan update. Pengelolaan administrasi desa menjadi suatu kewajiban yang mesti untuk dilakukan. Sebab, dengan tertibnya administrasi desa akan berpangkal terhadap terbentuknya tata pemerintahan yang baik, pembangunan dapat berjalan lancar dan pemberian layanan kepada masyarakat akan membaik pula (Onsardi et al., 2019). Olehnya itu, agar tujuan pemerintahan desa dapat tercapai maka penting didukung dengan kualitas aparatur desa yang memadai sehingga proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan begitu baik sebagaimana yang diharapkan, khususnya lagi mengenai pengolahan administrasi desa (Lembong et al., 2017). Berbicara mengenai tertib administrasi desa, menurut Septiani (2021) fakta menunjukkan bahwa belum semua aparatur desa mampu untuk menerapkan tertib administrasi desa dengan baik. Sehingga amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, dimana kurangnya pemahaman aparatur kampung/desa menjadi salah satu faktor pemicu mengenai persoalan tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, maka penting untuk dilakukan kegiatan pengabdian yang bertajuk "pelatihan penataan administrasi pemerintahan desa". Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur yang ada mengenai pentingnya tertib administrasi kampung. Adapun tujuan dilakukan pelatihan, yakni ; meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam mengelola data administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya buku pedoman administrasi umum di Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

METODE

Pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maka penting adanya metode yang digunakan. Metode ini merupakan suatu keniscayaan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan (Yumame et al., 2020). Senada, Renyaan (2022), metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Olehnya itu, kegiatan ini memanfaatkan metode ceramah dan diskusi; dilakukan pada saat pelatihan tentang administrasi pemerintahan desa. Selanjutnya, metode fasilitasi dilakukan dalam rangka pembuatan buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Selanjutnya, adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
(Renyaan & Sriyono, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam melakukan kegiatan penerapan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah masyarakat luas, baik sebagai individu, kelompok, komunitas ataupun lembaga yang berada di kawasan perkotaan maupun pedesaan (Feb undip, n.d.). Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini ialah Kepala Kampung Nolakla, Sekretaris Kampung Nolakla, dan Perangkat Desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) dan Kelembagaan-kelembagaan Kampung yang ada di Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini melibatkan antara dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan sebagai berikut:

a) Tahap awal

Pada tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan maka dilakukan survey terlebih dahulu. Termasuk pada tahapan ini dilakukan wawancara dengan aparatur kampung mengenai permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan administrasi pemerintahan desa.

b) Tahap inti

Pada tahapan inti, merupakan tahap pelaksanaan kegiatan dengan memberikan pelatihan kepada aparat kampung mengenai administrasi pemerintahan kampung berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Selain itu, pada tahapan ini pula dilakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pembuatan buku administrasi umum secara lengkap.

c) Tahap akhir

Tahapan akhir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan penyerahan buku administrasi pemerintahan kampung, diantaranya; Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Penduduk, Buku Administrasi Keuangan dan Buku Administrasi Pembangunan.

3. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama 2 (dua) hari. Hari pertama dilakukan survey dan wawancara dengan kepala kampung dan perangkatnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kendala-kendala yang tengah dihadapi kaitannya dengan implementasi administrasi kampung yang merupakan amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hari kedua yang merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan pelatihan, dimana pada tahapan ini para peserta mengikuti kegiatan pelatihan tersebut secara antusias. Hal ini dapat terlihat pada saat penyampaian materi mengenai administrasi pemerintahan kampung dimana peserta kegiatan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri kaitannya dengan administrasi kampung yang sejauh ini belum mereka pahami.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

Tanya jawab merupakan suatu cara penyajian pelajaran/materi yang dilakukan dengan dua arah dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta (Al Khoiri, 2019). Tanya jawab dilakukan selain untuk meningkatkan pemahaman peserta, juga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Dalam kegiatan sesi tanya jawab terungkap bahwa jika sejauh ini pelaksanaan administrasi umum oleh pemerintah Kampung Nolakla belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya dengan tidak diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kampung tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu MP sebagai salah satu kader posyandu di Kampung Nolakla yang mengatakan bahwa:

“Kami kader-kader posyandu selama ini sudah mengerjakan buku surat masuk dan surat keluar yang masih kurang itu dalam pembuatan surat keputusan. Kami sampai saat ini tidak ada SK Pengangkatan kami sebagai kader posyandu padahal kami sudah menimbang anak-anak sekian lama sampai anak-anak itu sudah besar dan mempunyai anak lagi dan kami timbang mereka lagi, sehingga seperti yang dijelaskan tadi agar pihak pemerintahan kampung membuat SK untuk kader-kader posyandu dan juga untuk kegiatan panitia khusus untuk perempuan .”

Senada yang dikatakan oleh Bapak Ketua RW 05 kaitannya dengan permasalahan mengenai Surat Keputusan (SK) Kepala Kampung bahwa :

“Selama ini pelayanan kami sudah berjalan dengan baik tetapi yang belum ada itu terkait dengan SK Panitia, baik itu Panitia Natal Kampung dan panitia yang lainnya, termasuk data penduduk yang masih kurang bagus sehingga kadang kami susah pada saat ada bantuan yang datang untuk segera dibagikan, terkadang banyak yang tidak mendapat bantuan karena pendataannya belum baik”

Setelah mengikuti pelatihan, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah peningkatan pada kemampuan yang dimiliki, termasuk menambah kepercayaan diri dalam melaksanakan suatu pekerjaan (*jobstreet.co.id*, 2022). Demikian halnya dengan perangkat kampung nolokla, melalui kegiatan pelatihan ini, telah memberikan pemahaman dan kemampuan bagi aparatur kampung (kepala kampung dan perangkatnya) mengenai sistem administrasi kampung. Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Bapak Kaur Umum Pemerintah Kampung Nolakla yang mengatakan bahwa:

“Penjelasan terkait dengan administrasi pemerintahan kampung sangat bagus untuk kami di kampung ini, sehingga apa yang diperoleh melalui pelatihan ini menjadi modal untuk memperbaiki sistem administrasi kampung Nolakla kedepannya”



Gambar 3. Foto Bersama dengan Kepala Kampung Nolokla dan Perangkatnya

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Kampung Nolokla begitu juga dengan perangkat kampung, setelah mengikuti kegiatan ini mereka telah memahami dan mampu mempraktekkan mengenai cara pengisian buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan dan buku administrasi pembangunan dengan baik. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah seperti pembuatan surat keputusan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga nantinya dapat diisi pada buku administrasi umum khususnya di bagian buku surat keputusan kepala desa. Dimana administrasi umum ini terdapat 9 (Sembilan buku) salah satunya adalah buku surat keputusan kepala desa/kampung, selain itu termasuk pendataan penduduk yang lengkap, sebagaimana terdapat 5 (lima) buku administrasi penduduk, seperti; Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, Buku Rekapitulasi Penduduk, Buku Penduduk Sementara, Buku KTP dan KK (Purnomo, 2020). Dengan tertibnya administrasi penduduk akan berdampak pula terhadap pemberian layanan kepada masyarakat dapat semakin baik.

SIMPULAN.

Kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk aparat kampung di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura telah didapatkan hasil sebagai berikut: Aparatur Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura telah memahami dengan baik dan benar tentang administrasi pemerintahan desa dan dapat mengisi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kendati demikian, yang perlu diperhatikan adalah seperti pembuatan surat keputusan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga nantinya dapat diisi pada buku administrasi umum khususnya di bagian buku surat keputusan kepala desa, termasuk pendataan penduduk yang lengkap, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik.

SARAN

Sebagai rekomendasi, sekiranya aparat pemerintahan Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura melakukan pendataan setiap bulan sekali dan diisi ke dalam buku administrasi pemerintahan kampung, yaitu; buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan dan buku administrasi pembangunan. Setiap kegiatan yang membentuk panitia maka harus dibuat Surat Keputusan Kepala Kampung dan diisi ke dalam buku administrasi umum yaitu buku surat keputusan kepala Kampung, dan setiap peraturan desa/kampung yang dibuat harus ditulis dalam buku administrasi umum yaitu buku peraturan desa/kampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung Nolokla bersama dengan perangkatnya atas waktu, dukungan dan partisipasinya selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2018). *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Al Khoiri, M. Yusuf. (2019) *Pengaruh Metode Tanya Jawab Terhadap Kemampuan Pemahaman Membaca Siswa Kelas Iv Mis Al-Khairat Deli Tua T.A 2018/2019*. Skripsi Thesis, Universitas Quality.
- Feb Undip. (n.d.). Pengabdian Masyarakat. Diunduh di: <https://manajemen.feb.undip.ac.id/pengabdian/> tanggal 19 Maret 2023.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Jobstreet.co.id. (2022). 4 Manfaat Pelatihan yang Kamu Dapat untuk Pengembangan Diri di Tempat Kerja. Diunduh di : <https://www.jobstreet.co.id/career-resources/plan-your-career/manfaat-pelatihan-dan-pengembangan-karyawan-anda/> tanggal 19 Maret 2023.
- Laing, R., Mutmainah, Z., Maskikit, E. B., Lembang, F. K., & Rahakbauw, D. L. (2022). Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Menuju Desa Mandiri Statistik. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 121-128.
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mais, T., Rumapea, P., & Rares, J. (2015). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Onsardi, O., Wati, D., & Anjani, R. (2019). Tata Kelola Administrasi Keuangan, dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 2(2), 169-176.
- Purnomo, U. (2020). Format Administrasi Desa Diunduh di: <https://balingasal.kec.padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/118/386> Tanggal 19 Maret 2023.
- Renyaan, D. (2022). Digitalisasi Kios Sembako Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Kaget Koya Barat-Kota Jayapura, Papua. *Jurnal Pengabdian Ahmad Yani*, 2(2), 1-9.
- Renyaan, D., & Sriyono, S. (2020). Penataan Administrasi Umum Di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 307-311.
- Septiani, M. (2021). Pentingnya Tertib Administrasi Pada Pemerintahan Desa. Diunduh dari : <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pentingnya-tertib-administrasi-pada-pemerintahan-desa-> Tanggal 19 Maret 2023.
- Tasik, D. I. (2016). Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1166.
- Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). Membangun Kampung Berbasis Data (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253.